

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan data **Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Garut Januari-Desember 2025**, terlihat dinamika harga yang fluktuatif sepanjang tahun. Dari 12 bulan pengamatan, **tujuh bulan mengalami kenaikan IPH** (Januari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember) serta **lima bulan mengalami penurunan IPH** (Februari, April, Mei, Agustus, dan November). Secara kumulatif, hingga akhir **Triwulan IV Tahun 2025**, IPH Kabupaten Garut mencatat **kenaikan bersih sekitar 3,40%** dibandingkan awal tahun, menunjukkan tekanan inflasi yang relatif terkendali namun tetap berfluktuasi.

Kenaikan IPH tertinggi terjadi pada **September 2025 sebesar 3,53%**, diikuti Januari (2,49%), Desember (1,95%), Maret (1,68%), dan Juni (1,48%). Peningkatan tersebut terutama dipicu oleh **kenaikan permintaan musiman**, momen hari besar keagamaan dan akhir tahun, serta **gangguan produksi akibat transisi musim dan cuaca ekstrem** yang berdampak pada komoditas hortikultura. Selain itu, keterbatasan pasokan dan distribusi di luar musim panen turut mendorong kenaikan harga. Komoditas yang secara konsisten memberi andil terbesar terhadap kenaikan IPH adalah **cabai rawit dan cabai merah**.

Sementara itu, penurunan IPH terjadi pada **April (-1,87%) dan Mei (-2,71%)** yang bertepatan dengan **panen raya beberapa komoditas pangan**, sehingga pasokan meningkat dan harga terkoreksi. Penurunan juga tercatat pada Februari (-0,99%), Agustus (-1,06%), dan November (-0,57%) sebagai bentuk **penyesuaian harga pasca lonjakan** pada bulan sebelumnya. Pada periode penurunan ini, komoditas yang dominan menahan IPH adalah **cabai rawit dan daging ayam ras**.

Secara keseluruhan, data hingga Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan bahwa **cabai rawit merupakan komoditas paling volatil** dalam pembentukan IPH Kabupaten Garut. Hal ini terjadi meskipun Kabupaten Garut merupakan **sentra produksi cabai nasional** dan memiliki **Champion Cabai** melalui skema *contract farming*. Sebagian besar hasil panen cabai disalurkan ke luar daerah, khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya, sehingga pasokan cabai untuk konsumsi lokal bergantung pada distribusi balik pasar regional. Kondisi tersebut menyebabkan **harga cabai di tingkat lokal sangat dipengaruhi dinamika harga nasional**, dan menjadi faktor utama fluktuasi IPH sepanjang tahun 2025.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Selama **Triwulan IV Tahun 2025 (Oktober-Desember)**, pengendalian inflasi di Kabupaten Garut dihadapkan pada tantangan yang bersifat **musiman, struktural, dan kelembagaan**, seiring meningkatnya tekanan permintaan menjelang **Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru)** serta faktor cuaca yang berpengaruh terhadap produksi dan distribusi pangan. Meskipun secara umum inflasi masih berada dalam rentang terkendali, beberapa komoditas pangan strategis menunjukkan potensi kenaikan harga yang perlu diantisipasi secara lebih intensif oleh Pemerintah Daerah melalui peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Permasalahan pengendalian inflasi pada periode ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan pasokan, tetapi juga terkait dengan **kelancaran distribusi logistik, kondisi**

infrastruktur transportasi pada musim penghujan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta efektivitas koordinasi lintas sektor. Selain itu, keterbatasan kelembagaan daerah dalam pengelolaan pangan—ditandai dengan belum adanya **BUMD pangan**—masih menjadi tantangan dalam memperkuat intervensi pasar dan menjaga stabilitas harga pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Garut.

1. Volatilitas Harga Komoditas Pangan Strategis Akibat Faktor Produksi dan Cuaca

Pada Triwulan IV 2025, fluktuasi harga pangan strategis masih didominasi oleh komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta komoditas protein hewani. Intensitas curah hujan yang tinggi pada periode ini berdampak pada penurunan produktivitas, gangguan panen, serta meningkatnya risiko gagal panen di beberapa sentra produksi. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan ke pasar menjadi tidak stabil dan berkontribusi pada kenaikan harga di tingkat konsumen.

Selain faktor cuaca, peningkatan biaya produksi pertanian, seperti harga pupuk non-subsidi, biaya tenaga kerja, serta ongkos distribusi akibat kondisi jalan dan cuaca ekstrem, turut memberikan tekanan terhadap harga pangan. Pada saat yang sama, permintaan masyarakat cenderung meningkat menjelang Nataru, sehingga ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi faktor pendorong utama volatilitas harga pada akhir tahun.

2. Keterbatasan Alokasi Anggaran Daerah

Upaya pengendalian inflasi pada Triwulan IV membutuhkan intervensi yang lebih intensif dan cepat, seperti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta dukungan distribusi pangan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung program TPID, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan pelaksanaan intervensi belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Selain itu, pada akhir tahun anggaran, fleksibilitas penggunaan anggaran menjadi semakin terbatas, sehingga beberapa kegiatan pengendalian inflasi masih bersifat reaktif dan jangka pendek, terutama dalam merespons lonjakan harga menjelang HBKN, tanpa dukungan perencanaan jangka menengah yang berkelanjutan.

3. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi dan Logistik Pangan

Permasalahan infrastruktur distribusi dan logistik masih menjadi tantangan signifikan pada Triwulan IV 2025. Kondisi jaringan jalan di beberapa wilayah sentra produksi pertanian, khususnya wilayah perdesaan dan selatan Kabupaten Garut, semakin rentan terhadap kerusakan akibat curah hujan tinggi. Hal ini berdampak pada terganggunya kelancaran distribusi pangan, meningkatnya biaya transportasi, serta risiko keterlambatan pasokan ke pasar.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, dan fasilitas pascapanen menyebabkan hasil pertanian dan perikanan tidak dapat disimpan secara optimal. Akibatnya, pasokan pangan sangat bergantung pada kondisi panen harian dan cuaca, sehingga fluktuasi harga di tingkat konsumen menjadi sulit dihindari, terutama pada komoditas mudah rusak.

4. Belum Terbentuknya BUMD Pangan sebagai Instrumen Stabilisasi Harga

Ketiadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di Kabupaten Garut masih menjadi keterbatasan struktural dalam pengendalian inflasi pada Triwulan IV 2025. Tanpa BUMD pangan, pemerintah daerah belum memiliki instrumen kelembagaan yang kuat untuk mengelola buffer stock, melakukan stabilisasi pasokan, serta intervensi harga secara langsung dan berkelanjutan.

Selama periode akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Garut masih bergantung pada mekanisme pasar, intervensi terbatas melalui operasi pasar, serta koordinasi dengan instansi vertikal seperti Bulog. Kondisi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menghadapi lonjakan harga yang bersifat musiman dan struktural, sehingga peran koordinasi TPID menjadi sangat krusial.

5. Sinergi Antar Pemangku Kepentingan yang Belum Optimal

Meskipun koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID telah dilaksanakan secara rutin, sinergi antar perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, dan kelompok tani pada Triwulan IV 2025 masih perlu diperkuat. Koordinasi lintas sektor cenderung bersifat responsif terhadap gejolak harga menjelang Nataru, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan pengendalian inflasi yang bersifat preventif dan berbasis data.

Keterbatasan integrasi data harga, data pasokan, dan informasi distribusi secara real time antar instansi juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menyebabkan pengambilan kebijakan pengendalian inflasi belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi yang komprehensif, sehingga efektivitas antisipasi dan intervensi harga pada akhir tahun masih perlu ditingkatkan.

6. Fluktuasi Harga Komoditas Strategis

Komoditas	Harga Tertinggi (Rp/kg)	Periode	Penyebab Utama
Cabai rawit merah/inul	Rp61.000	Desember 2025	Produksi belum banyak, belum masa panen, perluasan tanaman tidak sebanding dengan kebutuhan dan tidak mempunyai gudang penyimpanan
Bawang merah	Rp37.875	November 2025	Permintaan tinggi, belum masa panen
Daging ayam broiler	Rp36.600-38.600	Oktober-Desember 2025	Kenaikan harga pakan ayam, tingginya permintaan, peremajaan induk sehingga induknya belum maksimal
Telur ayam ras	Rp30.250-30.850	Oktober-Desember 2025	Kenaikan harga pakan ayam, tingginya permintaan, menurunnya produksi (ayam betina belum produktif)
Cabai merah keriting	Rp51.800-53.000	Oktober-November 2025	Produksi belum banyak, belum masa panen, perluasan tanaman tidak sebanding dengan kebutuhan dan tidak mempunyai gudang penyimpanan

Komoditas	Harga Tertinggi (Rp/kg)	Periode	Penyebab Utama
Cabai merah besar	Rp67.600 Rp58.870	Oktober dan Nov 2025	Produksi belum banyak, belum masa panen, perluasan tanaman tidak sebanding dengan kebutuhan dan tidak mempunyai gudang penyimpanan

Beberapa komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga signifikan selama Triwulan III 2025. Berdasarkan pantauan harga dari pasar-pasar utama di Garut dan sumber nasional, komoditas yang mengalami lonjakan harga antara lain:

Fluktuasi harga tersebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah menjadi salah satu faktor utama penyumbang inflasi daerah pada periode ini.

7. Masih Terbatasnya Skala Produksi Pangan Mandiri Masyarakat

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Garut terus mendorong penguatan ketahanan pangan lokal melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan TASYAKUR (Tanam Sayuran di Pekarangan Rumah). Namun, cakupan pelaksanaan kedua program tersebut masih terbatas pada sebagian wilayah dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan potensi program dalam menjaga keberlanjutan pasokan pangan dan menahan tekanan harga pada akhir tahun, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, belum sepenuhnya optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi, pengendalian inflasi di Kabupaten Garut pada Triwulan IV Tahun 2025 masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kelembagaan, seperti volatilitas harga komoditas pangan strategis, keterbatasan infrastruktur distribusi dan logistik, belum terbentuknya BUMD pangan, serta sinergi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Meskipun tekanan inflasi relatif dapat dikendalikan dibandingkan periode dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional, potensi risiko inflasi menjelang akhir tahun tetap memerlukan kewaspadaan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengendalian inflasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan peran dan koordinasi TPID, percepatan perbaikan infrastruktur distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD), serta penguatan sistem monitoring harga pangan berbasis digital sebagai early warning system. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kabupaten Garut.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Garut pada **Triwulan IV Tahun 2025** diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting menjelang akhir tahun, menjamin ketersediaan pasokan, serta memperlancar distribusi antar wilayah. Fokus kebijakan semakin diperkuat mengingat adanya potensi peningkatan permintaan musiman, cuaca yang memengaruhi produksi pangan, serta dinamika distribusi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan pergantian tahun. Seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Garut**.

TPID Kabupaten Garut berperan sebagai forum strategis dalam menghimpun dan menganalisis data harga serta pasokan pangan, merumuskan langkah antisipatif terhadap potensi gejolak inflasi, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pengendalian harga di pasar rakyat. Dalam kondisi belum tersedianya BUMD pangan daerah, TPID mengoptimalkan peran perangkat daerah teknis, memperkuat kerja sama dengan Bulog, serta menjalin sinergi dengan pelaku usaha, distributor, dan kelompok produsen pangan.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan, serta untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, menjaga daya beli masyarakat, dan mengurangi disparitas harga antar kecamatan/wilayah, **TPID Kabupaten Garut pada Triwulan IV Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengendalian inflasi**, sebagai berikut:

1. **Keterjangkauan Harga**
2. **Monitoring Perkembangan Harga dan Ketersediaan Komoditas Peternakan di Tingkat Konsumen (Pasar) dan Distributor**

Komoditas peternakan merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan inflasi daerah. Fluktuasi harga dan ketersediaan komoditas peternakan, seperti daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, dan produk peternakan lainnya, perlu dimonitor secara berkala guna menjaga stabilitas harga dan menjamin keterjangkauan bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan kegiatan monitoring perkembangan harga dan ketersediaan komoditas peternakan di tingkat konsumen (pasar) dan distributor sebagai bahan evaluasi serta dasar perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi pasokan di daerah.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa secara umum harga komoditas peternakan di tingkat konsumen mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi pasokan, permintaan, serta faktor musiman. Pada periode monitoring, harga daging ayam ras dan telur ayam ras relatif stabil dengan kecenderungan fluktuasi kecil, sementara harga daging sapi menunjukkan pergerakan yang lebih fluktuatif, terutama menjelang hari besar keagamaan atau momen peningkatan permintaan. Harga di tingkat konsumen masih berada pada kisaran yang dapat dijangkau masyarakat dan sebagian besar berada di bawah atau mendekati Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah.

Di tingkat distributor, harga komoditas peternakan relatif lebih stabil dibandingkan tingkat konsumen. Perubahan harga di tingkat distributor umumnya dipengaruhi oleh biaya produksi, harga pakan, biaya transportasi, serta pasokan dari daerah sentra produksi. Selisih harga antara distributor dan pasar masih berada pada batas wajar, mencerminkan rantai distribusi yang berjalan normal.

Berdasarkan hasil monitoring, ketersediaan komoditas peternakan di pasar dan distributor secara umum dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Distributor menyatakan pasokan masih lancar dan tidak terdapat kendala signifikan dalam proses distribusi. Stok komoditas utama diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan untuk beberapa waktu ke depan, dengan catatan tidak terjadi gangguan cuaca ekstrem atau hambatan distribusi lainnya. Stabilitas harga dan ketersediaan komoditas peternakan menunjukkan bahwa sistem distribusi dan pasokan berjalan dengan baik. Fluktuasi harga yang terjadi masih dalam batas kewajaran dan lebih dipengaruhi oleh dinamika permintaan serta faktor musiman. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya pada kelompok pangan. Namun demikian, perlu tetap diwaspadai potensi risiko seperti kenaikan harga pakan ternak, gangguan distribusi, serta lonjakan permintaan pada periode tertentu yang dapat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

1. **Monitoring Harga dan Ketersediaan Pakan Ternak**

Pakan ternak merupakan komponen biaya produksi terbesar dalam usaha peternakan, khususnya pada subsektor unggas dan ternak ruminansia. Fluktuasi harga dan ketersediaan pakan ternak secara langsung berpengaruh terhadap biaya produksi, harga jual produk peternakan (daging, telur, susu), serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, monitoring harga dan ketersediaan pakan ternak menjadi bagian penting dalam strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan kegiatan monitoring harga dan ketersediaan pakan ternak di tingkat produsen, distributor, dan pasar sebagai upaya deteksi dini potensi gangguan pasokan serta lonjakan harga yang dapat berdampak pada inflasi komoditas pangan asal hewan.

Stabilitas harga dan ketersediaan pakan ternak memiliki hubungan langsung dengan pengendalian inflasi daerah, khususnya pada kelompok komoditas pangan asal hewan. Hal ini disebabkan oleh :

1. Pengendalian biaya produksi ternak

Harga pakan yang stabil menjaga biaya produksi peternak tetap terkendali, sehingga tidak mendorong kenaikan harga daging, telur, dan produk ternak lainnya di tingkat konsumen.

1. Stabilitas harga pangan strategis

Produk peternakan merupakan komoditas strategis pembentuk inflasi. Kestabilan pakan berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan utama di pasar.

1. Menjaga pasokan berkelanjutan

Ketersediaan pakan yang cukup memastikan produksi ternak berjalan normal, sehingga tidak terjadi kelangkaan pasokan yang dapat memicu inflasi akibat tekanan permintaan.

1. Penguatan rantai pasok pangan

Monitoring pakan ternak menjadi bagian dari penguatan sistem hulu-hilir pangan, yang merupakan pilar penting dalam strategi pengendalian inflasi daerah.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa harga pakan ternak relatif stabil dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh :

- Harga bahan baku pakan (terutama jagung dan bungkil kedelai)
- Biaya distribusi dan transportasi
- Ketersediaan pasokan dari daerah sentra produksi

Meskipun terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis pakan, pergerakannya masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan lonjakan ekstrem.

Ketersediaan pakan ternak secara umum berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan peternak. Stok di tingkat distributor dan toko pakan relatif tersedia, serta distribusi berjalan lancar tanpa hambatan signifikan. Tidak ditemukan indikasi kelangkaan pakan yang berpotensi mengganggu produksi ternak.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa kondisi harga dan ketersediaan pakan ternak saat ini

masih mendukung stabilitas produksi peternakan. Sistem distribusi berjalan normal, dan stok relatif aman. Hal ini berdampak positif terhadap stabilitas harga produk peternakan di tingkat konsumen, sehingga turut menjaga laju inflasi daerah tetap terkendali. Namun demikian, tetap perlu diantisipasi potensi risiko seperti ketergantungan bahan baku impor, fluktuasi harga jagung nasional, kenaikan biaya logistik dan gangguan distribusi akibat faktor cuaca atau kebijakan.

1. Ketersediaan Pasokan

Pemkab Garut menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, seperti Kabupaten Ciamis untuk menjaga pasokan barang, khususnya daging ayam, telur, dan cabai. Selain itu, program seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Tanam Sayur di pekarangan rumah (TASYAKUR) turut digalakkan guna memperkuat produksi pangan lokal.

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Dilaksanakan secara selektif di wilayah yang mengalami tekanan harga tinggi, bekerja sama dengan Bulog dan distributor pangan.
2. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Bersubsidi (OPADI) menjelang Natal dan Tahun Baru dimana kegiatan tersebut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sedangkan kabupaten Garut sebagai penerima manfaat yaitu menyediakan lokasi kegiatan di Kecamatan Cilawu dan Bl.Limbangan. OPADI dilaksanakan pada tanggal 17-18 Desember 2025 dengan alokasi sebanyak 7.377 Paket masing-masing paket berisi beras premium 3 Kg, minyak goreng 1 Liter, gula pasir 1 Kg dan tepung terigu 1 Kg. Adapun harga sebelum subsidi sebesar Rp. 96.700, nilai subsidi Rp. 56.700 dan harga tebus masyarakat Rp. 40.000.
3. Melakukan monitoring TASYAKUR dan GITARASA
4. Optimalisasi penanaman cabai pada kegiatan TASYAKUR baik di demplot atau pekarangan rumah masyarakat melalui polibag.
5. Optimalisasi penanaman bawang merah, aneka cabai, telur ayam pada kegiatan GITA RASA.
6. Monitoring Produksi Telur Pada Program MIHAPE (Memelihara ayam Petelur)

Telur ayam ras merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan inflasi daerah, khususnya pada kelompok makanan. Fluktuasi harga telur sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara produksi, ketersediaan pasokan, dan permintaan masyarakat. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan telur ayam ras, maka dilaksanakan kegiatan MIHAPE (Memelihara Ayam Petelur). Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan monitoring produksi telur pada kelompok peternak penerima manfaat untuk memastikan keberlanjutan produksi, kecukupan pasokan, serta efektivitas program dalam mendukung pengendalian inflasi daerah.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa kegiatan MIHAPE berdampak positif terhadap peningkatan dan stabilitas produksi telur pada peternak masyarakat. Produksi telur relatif stabil dan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya manajemen pemeliharaan dan ketersediaan sarana produksi yang memadai. Peternak penerima manfaat mampu menghasilkan telur secara berkelanjutan sehingga menambah pasokan telur ayam ras di tingkat lokal. Produksi telur dari peternak sebagian besar disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar, hal ini membantu memperpendek rantai distribusi dan memperkuat pasokan telur di tingkat konsumen, sehingga mengurangi potensi lonjakan

harga akibat keterbatasan pasokan. Kondisi saat ini produksi telur pada Program MIHAPE yang berlokasi di Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja sebesar 82% dengan populasi sebanyak 392 ekor dari populasi awal sebanyak 400 ekor.

1. Revitalisasi dan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan infrastruktur strategis dalam rantai pasok komoditas peternakan, khususnya daging sapi dan daging lainnya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ketersediaan RPH yang layak, higienis, dan beroperasi secara optimal berpengaruh langsung terhadap kelancaran pemotongan ternak, distribusi daging, serta pembentukan harga di tingkat konsumen. Keterbatasan kapasitas dan kondisi RPH yang belum optimal berpotensi menimbulkan hambatan pasokan daging, meningkatkan biaya produksi dan distribusi, serta mendorong kenaikan harga daging yang berdampak terhadap inflasi daerah. Oleh karena itu, revitalisasi dan pembangunan RPH menjadi salah satu strategi penting dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya pada kelompok pangan asal hewan.

1. Kelancaran Distribusi

Pada Triwulan IV Tahun 2025, upaya menjaga kelancaran distribusi pangan difokuskan padaantisipasi peningkatan permintaan akhir tahun dan potensi gangguan cuaca. Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, aparat lalu lintas, serta pelaku transportasi lokal guna memastikan distribusi komoditas pangan strategis ke pasar rakyat berjalan lancar dan tepat waktu.

1. Komunikasi yang Efektif

Strategi komunikasi publik terus dioptimalkan melalui penyampaian informasi harga dan ketersediaan pangan secara berkala melalui kanal digital pemerintah daerah, media sosial, serta sarana informasi di pasar. Edukasi kepada masyarakat mengenai belanja bijak, pemanfaatan pangan lokal, dan kewaspadaan terhadap informasi harga yang tidak valid juga diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi.

1. Rapat koordinasi Dwimingguan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Pemantauan harga komoditas pangan strategis pada aplikasi SIMPANGAN secara *real time*;
3. Sosialisasi pembuatan pakan mandiri (*self mixing*) berbasis jagung lokal pada komoditas ayam petelur

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur, yang dapat mencapai lebih dari 60 persen total biaya produksi. Ketergantungan terhadap pakan pabrikan dan bahan baku impor menjadikan biaya produksi peternak sangat rentan terhadap fluktuasi harga, yang pada akhirnya berdampak pada harga telur ayam ras di tingkat konsumen. Sebagai upaya menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga telur, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembuatan Pakan Mandiri (*Self Mixing*) berbasis jagung lokal pada komoditas ayam petelur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peternak dalam memproduksi pakan secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal, sekaligus mendukung strategi pengendalian inflasi daerah dari sisi hulu sektor peternakan.

Dengan penerapan pakan mandiri berbasis jagung lokal, peternak berpotensi menurunkan biaya pakan dan meningkatkan efisiensi usaha. Efisiensi biaya ini diharapkan berdampak pada stabilitas harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi harga telur ayam

ras merupakan salah satu fokus pengendalian inflasi daerah, mengingat telur termasuk komoditas penyumbang inflasi pada kelompok pangan. Melalui kegiatan sosialisasi pakan mandiri berbasis jagung lokal, tekanan inflasi dari sisi biaya produksi (*cost-push inflation*) dapat ditekan. Penggunaan bahan baku lokal mengurangi ketergantungan terhadap pakan pabrikan dan bahan impor, sehingga harga telur lebih terkendali dan pasokan lebih stabil. Kegiatan ini sejalan dengan strategi TPID dalam pengendalian inflasi berbasis penguatan sektor hulu dan pemanfaatan sumber daya lokal. Sosialisasi pembuatan pakan mandiri (*self mixing*) berbasis jagung lokal pada komoditas ayam petelur dilakukan pada Pondok Pesantren Riyadul Athfal yang beralamat di Kp Gadog Ilir Desa Mekarsari Kecamatan Cibatuh.

1. Rapat Teknis dan High Level Meeting (HLM) TPID

Sebagai forum evaluasi dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi berbasis data dan kondisi lapangan terkini.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi merupakan proses strategis untuk menilai efektivitas kebijakan dan program dalam menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Evaluasi ini juga menjadi dasar perbaikan kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi, perubahan iklim, dan pola distribusi komoditas di tingkat lokal.

Di Kabupaten Garut, evaluasi kebijakan pengendalian inflasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pemantauan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), pergerakan harga harian komoditas strategis di pasar rakyat, kondisi distribusi logistik, serta hasil pelaksanaan program intervensi perangkat daerah. Evaluasi diperkuat melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, aparat pengawasan, serta hasil monitoring lapangan.

Memasuki **Triwulan IV Tahun 2025**, dinamika pengendalian inflasi menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan Triwulan III. Tekanan inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun dan Hari Besar Keagamaan Nasional, kondisi cuaca yang memengaruhi produksi hortikultura, serta kenaikan biaya distribusi dan logistik.

1. **Capaian Positif**

2. Stabilisasi Harga Beberapa Komoditas Strategis

Pada Triwulan IV Tahun 2025, TPID Kabupaten Garut relatif berhasil menjaga stabilitas harga beberapa komoditas pangan pokok utama seperti beras medium, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan operasi pasar secara selektif, fasilitasi distribusi antar wilayah, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah pemasok. Upaya tersebut berkontribusi dalam menahan laju inflasi daerah agar tetap terkendali menjelang akhir tahun.

2. Penguatan Koordinasi dan Konsistensi TPID

Koordinasi TPID semakin terstruktur melalui pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM), rapat

teknis lintas OPD, serta peningkatan peran sekretariat TPID dalam pengolahan dan analisis data harga. Sinergi antara perangkat daerah teknis dan Bank Indonesia menjadi penguatan penting, meskipun Kabupaten Garut belum memiliki BUMD pangan sebagai instrumen stabilisasi stok.

3. Peningkatan Peran Komunikasi Publik

Komunikasi publik terkait perkembangan harga, ketersediaan pangan, dan imbauan belanja bijak terus diperkuat melalui media sosial pemerintah daerah, penyuluhan, serta peran kecamatan dan desa. Langkah ini membantu menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan meredam potensi kepanikan pasar menjelang akhir tahun.

1. Permasalahan dan Tantangan

1. Volatilitas Harga Komoditas Hortikultura

Pada Triwulan IV 2025, komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah masih mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh gangguan produksi akibat cuaca, keterbatasan pasokan lokal, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Sistem Distribusi

Distribusi pangan ke wilayah pinggiran dan daerah dengan akses transportasi terbatas masih menghadapi kendala biaya dan waktu tempuh. Ketiadaan BUMD pangan menyebabkan pemerintah daerah masih bergantung pada mekanisme pasar dan koordinasi lintas daerah dalam menjaga pasokan.

3. Monitoring Harga dan Stok yang Belum Sepenuhnya Digital

Monitoring harga dan stok pangan belum sepenuhnya berbasis sistem digital terintegrasi, terutama untuk pasar hewan dan distribusi komoditas tertentu. Kondisi ini berpotensi memperlambat respons kebijakan saat terjadi gejolak harga.

4. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Kabupaten Garut masih bergantung pada pasokan komoditas tertentu seperti **bawang putih dan kedelai** dari luar daerah. Ketergantungan ini meningkatkan risiko inflasi apabila terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga di tingkat nasional.

1. Evaluasi Umum Kebijakan Pengendalian Inflasi

Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi oleh TPID Kabupaten Garut pada Triwulan IV Tahun 2025 telah memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Berbagai intervensi pengendalian harga dan pasokan mampu menahan gejolak inflasi komoditas pokok. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan produksi pangan lokal, optimalisasi distribusi, serta pemanfaatan sistem informasi harga yang lebih akurat dan responsif.

Beberapa isu strategis yang masih memerlukan perhatian antara lain kerentanan produksi

pangan terhadap perubahan cuaca, keterbatasan pengelolaan stok pascapanen, ketergantungan terhadap komoditas impor tertentu, kesenjangan antara laporan distributor dan kondisi riil di lapangan, serta belum optimalnya sistem monitoring harga dan ketersediaan ternak hidup yang masih dilakukan secara manual. Selain itu, pengawasan dan tindak lanjut terhadap praktik spekulatif di tingkat distributor dan pedagang masih perlu diperkuat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian inflasi pada Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Garut melalui TPID perlu memperkuat kebijakan yang bersifat **antisipatif terhadap peningkatan permintaan akhir tahun, Hari Besar Keagamaan Nasional, serta dampak lanjutan perubahan iklim** terhadap produksi dan distribusi pangan strategis.

1. Penguatan stabilitas harga komoditas pangan strategis diarahkan melalui **pemantauan harga dan pasokan secara intensif** di pasar-pasar utama dan sentra distribusi dengan memanfaatkan aplikasi **SIMPANGAN yang terintegrasi dengan SILINDA Jawa Barat**, disertai verifikasi lapangan dan pengawasan distributor, khususnya pada komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga di atas HET. Sidak pasar dan distributor dilakukan secara selektif dan terkoordinasi untuk menjaga kepatuhan tata niaga.
2. Sebagai langkah intervensi, TPID melanjutkan pelaksanaan **Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM)** secara terarah pada kecamatan dengan tekanan harga tertinggi, wilayah dengan akses pasar terbatas, serta menjelang periode rawan inflasi akhir tahun. Kegiatan ini dikombinasikan dengan pelayanan publik guna memperluas jangkauan dan efektivitas intervensi harga.
3. Dari sisi ketersediaan pasokan, penguatan produksi pangan lokal tetap menjadi prioritas melalui optimalisasi program tanam cepat panen, pemanfaatan pekarangan rumah tangga melalui **Gerakan Tanam Sayuran di Pekarangan (TASYAKUR)**, serta peningkatan penyerapan hasil panen petani lokal bekerja sama dengan **Bulog** dan mitra strategis. Diversifikasi sumber pasokan juga terus diperkuat agar tidak bergantung pada satu wilayah produsen.
4. Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID mendorong penguatan **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** yang telah berjalan agar ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian operasional yang lebih konkret, serta peningkatan koordinasi lintas OPD dalam pengaturan distribusi logistik, khususnya ke wilayah selatan dan daerah dengan keterbatasan akses transportasi.
5. Pada sektor peternakan, pengendalian inflasi diarahkan melalui penguatan efisiensi biaya produksi, antara lain dengan memperluas sosialisasi pakan mandiri (self-mixing), peningkatan manajemen usaha peternakan, serta pengembangan hilirisasi produk peternakan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak dan konsumen.
6. Sebagai penguatan tata kelola, TPID Kabupaten Garut perlu meningkatkan **digitalisasi monitoring harga dan stok pangan**, memperkuat fungsi pengawasan lapangan terhadap praktik spekulasi, serta mengintensifkan forum koordinasi lintas OPD, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjelang dan selama periode rawan inflasi, guna memastikan kebijakan pengendalian inflasi tetap responsif, terukur, dan berkelanjutan.